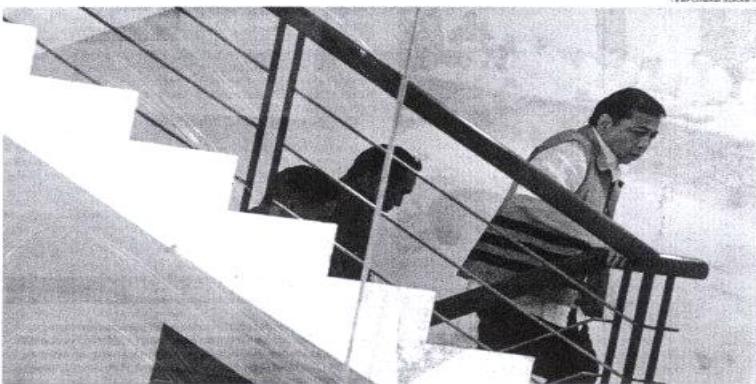




# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## http://kliping.dpr.go.id

Judul : Sejumlah Partai Desak MKD Sidangkan Setya Novanto  
Tanggal : Rabu, 29 November 2017  
Surat Kabar : Koran Tempo  
Halaman : 5



Ketua DPR Setya Novanto di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis pekan lalu.

## Sejumlah Partai Desak MKD Sidangkan Setya Novanto

Mahkamah tak perlu mengadakan rapat konsultasi dengan pemimpin fraksi.

**Maya Ayu Puspitasari**  
maya.puspitasari@tempo.co.id

JAKARTA — Sejumlah partai politik mendorong Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD) untuk segera sidangkan peranginan dugaan pelanggaran etik oleh Setya Novanto. Para pemimpin partai menyatakan ketambahan MKD dalam memproses kasus etik ketua DPR justru membuat buruk citra lembaga legislatif.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Baidowi, misalnya, mendesak MKD agar cepat bekerja. Ia menduga kelambanan MKD dipicu surat yang dikirimkan Setya dari dalam tahaman Komisi Pemberantasan Korupsi pada 21 November lalu. Dalam surat tersebut, Setya meminta pemimpin Dewan tak menggelar rapat pleno dan rapat MKD untuk membahas pencopotan dirinya.

Meski ada surat dari Setya, menurut Baidowi, MKD semestinya tetap menggelar rapat. "MKD membuat posisi DPR kian sulit di hadapan publik," kata Baidowi di Jakarta,

**Kami sayangkan MKD yang lambat dalam kasus ini. Sikap MKD ini membuat institusi DPR semakin sulit di hadapan publik. Kami meminta MKD bersifat profesional. Ini bagian dari kritik internal demi marwah lembaga DPR.**

WAKIL SEKRETARIS JENDERAL PPP  
ACHMAD BAIUDWI

kemarin. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Setya sebagai tersangka kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik. Ketua Umum Partai Golkar ini dituding terlibat kasus korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun dari nilai total proyek Rp 5,84 triliun itu.

Selama pekan lalu, MKD telah mengadakan rapat konsultasi dengan pemimpin fraksi. Ketua MKD Sufmi Daaco menyatakan rapat konsultasi diperlukan karena menyajikan posisi pemimpin DPR. Namun rapat itu batal karena empat fraksi absen: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. "MKD perlu masing-masing fraksi," kata Sufmi.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyatakan Setya sebaiknya mundur dari jabatan Ketua DPR. MKD, menurut Zulkifli, tak bisa didesak untuk melengserkan Setya jika Golkar belum menentukan penggantinya. "Bagus kalau Pak Novanto mundur. Bagusnya, telah memasukkan laporan dugaan pelang-

garan etik oleh Setya ke MKD.

Senada dengan Zulkifli, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Komarudin Wetubun mengatakan kasus Setya memulakan Dewan. Ia meminta MKD segera menyidangkan kasus tersebut. "Tak semua anggota Dewan bertenggak. Ia harus diganti," kata dia.

Desakan juga datang

dari anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Lukman Edy. Menurut dia, MKD bisa langsung menggelar rapat tanpa harus berkonsultasi dulu kepada pemimpin fraksi. Sebab, MKD beranggottakan semua unsur fraksi. "Kalau MKD tak segera rapat, berarti tak responsif terhadap suara masyarakat," kata dia.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate melontarkan hal senada. "MKD bisa menentukan sikap melalui ketua kelompok fraksi di internal mahkamah," kata dia.

Dorongan agar MKD menyidangkan dugaan pelanggaran etik Setya juga datang luar gedung DPR. Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia Pasca

### Mereka Ingin Mahkamah Segera Bergerak

**MAYORITAS** pemimpin partai politik mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat segera mengambil sikap terhadap laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan ketua DPR Setya Novanto. Benut ini sikap sejumlah partai.



KETUA UMUM PAN ZULKIFLI HASAN: "Saya sudah meminta sejak awal, Pak Novanto mundur. Itu baik untuk Pak Novanto, baik untuk DPR, dan baik untuk Golkar."



SEKRETARIS JENDERAL NASDEM JOHNNY G. PLATE: "Fraksi NasDem akan selalu siap jika dibutuhkan untuk rapat. Sebagai anggota kehormatan Dewan setidak konsultasi dan badan, MKD tidak harus konsultasi dengan fraksi. Cukup melalui ketua kelompok fraksi di MKD."



KETUA UMUM DEMOKRAT ROY SURYO: "Lebih baik MKD segera ber sikap, apalagi sudah banyak permintaan dari masyarakat."



KETUA HARIAN GOLKAR NURDIN HALID: "Posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR menunggu putusan praperadilan."

• MATA AYU PUSPITASARI